

**PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN
SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA KONSERVASI
PENYU AMPING PARAK**

Wahyuni Maharani¹, Sri Rahmadani², Isnaini³

¹Pendidikan Sosiologi Universitas PGRI Sumatera Barat

²Pendidikan Sosiologi Universitas PGRI Sumatera Barat

³Pendidikan Sosiologi Universitas PGRI Sumatera Barat

Alamat e-mail : 1wahyunimaharani14@gmail.com, Alamat e-mail :

2sriahmadani118@gmail.com, Alamat e-mail : 3ichagta@gmail.com

ABSTRACT

This study explores community participation in sea turtle conservation in Nagari Amping Parak, Sutera District, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra. The research background highlights the high threat of turtle extinction due to the practice of egg collection for consumption and trade. However, through conservation initiatives involving local communities, village government, and the Marine and Fisheries Department, a significant transformation occurred—from exploiting turtle eggs to becoming active protectors. The purpose of this study is to analyze the forms of community participation in sea turtle conservation and to identify the actors involved.

This study explores community participation in sea turtle conservation in Nagari Amping Parak, Sutera District, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra. The research background highlights the high threat of turtle extinction due to the practice of egg collection for consumption and trade. However, through conservation initiatives involving local communities, village government, and the Marine and Fisheries Department, a significant transformation occurred—from exploiting turtle eggs to becoming active protectors. The purpose of this study is to analyze the forms of community participation in sea turtle conservation and to identify the actors involved. This research applied a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews, observations, and document studies. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Amping Parak community actively participates in conservation activities such as education, beach cleaning, turtle patrols, data collection, and turtle care. This behavioral shift is strengthened by the establishment of the Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL), a youth-based environmental organization driving conservation efforts. Based on Arnstein's (1969) Ladder of Citizen Participation, the community's participation reached the Partnership level, indicating genuine involvement in decision-making and implementation. The study concludes that community participation not only contributes to the sustainability of sea turtle conservation but also promotes ecotourism development and enhances the local economy. Thus, sea turtle conservation in Nagari Amping Parak demonstrates how community involvement can ensure environmental sustainability while generating socio-economic benefits.

Keywords: Community Participation, Sea Turtle Conservation, Ecotourism, Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dalam program konservasi penyu. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya ancaman kepunahan penyu akibat praktik pengambilan telur untuk konsumsi maupun diperjualbelikan. Namun, melalui intervensi konservasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah nagari, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan perilaku masyarakat dari pengambil telur menjadi pelindung aktif. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi penyu serta peran aktor yang terlibat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Amping Parak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti edukasi, patroli pantai, pendataan penyu, menjaga kebersihan pantai, hingga perawatan penyu. Perubahan paradigma ini diperkuat dengan adanya organisasi *Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)* yang berperan sebagai penggerak konservasi. Berdasarkan teori *Tangga Partisipasi Arnstein (1969)*, tingkat partisipasi masyarakat berada pada level *Partnership* (kemitraan), yang ditandai dengan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan konservasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya berdampak pada keberhasilan pelestarian penyu, tetapi juga mendorong perkembangan ekowisata dan peningkatan ekonomi lokal. Dengan demikian, konservasi penyu di Nagari Amping Parak menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat dapat menciptakan keberlanjutan lingkungan sekaligus manfaat sosial ekonomi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Konservasi Penyu, Ekowisata, Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL).

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megabiodiversitas di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Data menunjukkan terdapat lebih dari 25.000 spesies tumbuhan berbunga atau sekitar 10% dari total spesies dunia, 515 spesies mamalia (12% dari total dunia), 600 spesies reptil, 1.500 spesies burung, dan 270 spesies amfibi (Siboro, 2019). Keanekaragaman hayati ini tidak

hanya berfungsi sebagai penopang ekosistem, tetapi juga sebagai modal pembangunan nasional yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu satwa penting di Indonesia adalah penyu, yang memiliki peran ekologis, ekonomis, dan kultural. Secara ekologis, penyu berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama dalam mempertahankan kesehatan terumbu karang dan padang lamun. Secara ekonomis, penyu bernilai tinggi karena

sejak lama dikaitkan dengan perdagangan telur, daging, maupun cangkangnya. Sementara secara kultural, penyu sering dikaitkan dengan tradisi masyarakat pesisir (Hamino, Parawangsa, Sari, & Arsad, 2021).

Di perairan Indonesia terdapat enam dari tujuh spesies penyu dunia, yakni penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu pipih (*Natator depressus*), dan penyu tempayan (*Caretta caretta*). Seluruh jenis penyu tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundangan. Misalnya, penyu belimbing dilindungi melalui SK Menteri Pertanian No. 327/kpts/Um/5/1978, penyu tempayan dan penyu lekang melalui SK Menteri Pertanian No. 716/kpts/Um/10/1980, penyu sisik dan penyu pipih melalui SK Menteri Kehutanan No. 882/Kpts-II/1992, sementara penyu hijau dilindungi melalui PP No. 7 Tahun 1999 (Ario, Wibowo, Pratikto, & Fajar, 2016). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut seringkali tidak diindahkan. Praktik pengambilan telur penyu

secara bebas masih marak dilakukan oleh masyarakat, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual secara ilegal. Kepercayaan tradisional mengenai manfaat konsumsi daging dan telur penyu juga memperkuat praktik tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan ancaman kepunahan (Suryawan & Tehupeiory, 2023).

Kondisi tersebut juga terjadi di Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sebelum adanya program konservasi, hampir seluruh masyarakat memanfaatkan telur penyu untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan. Namun, sejak tahun 2013 terjadi perubahan penting ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama masyarakat membentuk *Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)*. Lembaga ini kemudian dikukuhkan melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan Nomor 523/374/DKP-PS/XI-2015, dan menjadi motor penggerak konservasi penyu di Pantai Amping Parak. Perubahan tersebut menandai transformasi sosial, di mana masyarakat yang semula berperan sebagai “pengambil” telur penyu kini beralih menjadi pelindung aktif habitat

penyu. Selain itu, konservasi penyu di Amping Parak juga mendorong berkembangnya ekowisata yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar pantai.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program konservasi. Menurut Adil Siswanto (2024), partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan langsung individu maupun kelompok dalam pengambilan keputusan, tukar informasi, hingga pelaksanaan program. Partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi strategi penting dalam pembangunan yang menekankan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *Tangga Partisipasi* yang dikemukakan Arnstein (1969), yang membagi partisipasi ke dalam delapan tingkatan, mulai dari non-participation (manipulasi, terapi), tokenism (informing, consultation, placation), hingga citizen power (partnership, delegated power, citizen control). Teori ini membantu menganalisis sejauh mana masyarakat benar-benar memiliki kendali dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi objek dalam program pembangunan

(Jussac Maulana Masjhoer, 2025; Siti Nurjanah Ahmad, 2024).

Dalam konteks konservasi penyu di Amping Parak, keterlibatan masyarakat terlihat nyata melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, patroli pantai, pendataan penyu, hingga perawatan tukik. Partisipasi ini juga tidak terlepas dari sinergi dengan pemerintah nagari serta dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Di sisi lain, berkembangnya konservasi berbasis masyarakat tersebut telah mengundang banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal. Dengan demikian, konservasi penyu di Amping Parak bukan hanya menjaga kelestarian satwa langka, tetapi juga menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis siapa saja aktor yang terlibat dalam konservasi penyu di Nagari Amping Parak, serta bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis pada kajian sosiologi lingkungan

sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang strategi konservasi yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami fenomena sosial mengenai partisipasi masyarakat dalam konservasi penyu di Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan perilaku, motivasi, dan tindakan masyarakat dalam konteks alamiah (Moleong, 2005; Sugiyono, 2009). Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam konservasi. Informan terdiri dari pengurus *Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)*, pemerintah nagari, masyarakat setempat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan total 12 orang yang dianggap representatif.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yakni data primer melalui observasi non-partisipatif dan wawancara mendalam, serta data sekunder berupa dokumen resmi,

peraturan, laporan kegiatan, dan catatan kunjungan wisatawan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai bentuk partisipasi masyarakat, peran aktor, serta kontribusi kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan konservasi penyu di Amping Parak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservasi penyu di Nagari Amping Parak merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang saling melengkapi perannya. Aktor utama yang berperan adalah *Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)*, Pemerintah Nagari Amping Parak, masyarakat setempat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. LPPL sebagai organisasi masyarakat pengawas konservasi dibentuk sejak tahun 2013, kemudian dilegalkan melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan Nomor 523/374/DKP-PS/XI-2015. LPPL menjadi motor

penggerak utama dalam pelestarian penyu, dengan tanggung jawab melakukan patroli pantai, menjaga sarang penyu dari perburuan, melakukan pendataan dan penangkaran, hingga pelepasan tukik ke laut. Selain itu, LPPL juga menjalankan fungsi edukasi dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga penyu sebagai satwa dilindungi.

Pemerintah Nagari Amping Parak memiliki peran dalam mendukung dan menguatkan program konservasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan tingkat nagari, penyediaan lahan ulayat untuk lokasi konservasi, serta koordinasi antara masyarakat dan pihak eksternal. Peran tokoh adat, seperti niniak mamak, juga penting karena memberikan izin penggunaan tanah ulayat untuk kegiatan konservasi. Hal ini memperlihatkan adanya legitimasi adat yang menguatkan program konservasi di tingkat lokal. Sementara itu, masyarakat setempat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, melainkan juga terlibat langsung dalam kegiatan konservasi. Mereka ikut menjaga kebersihan pantai sebagai habitat penyu, mengikuti

kegiatan edukasi yang diadakan pemerintah dan LPPL, serta mendukung secara sukarela kegiatan patroli penyu.

Kegiatan konservasi penyu yang melibatkan masyarakat di Amping Parak terdiri dari beberapa bentuk nyata. Pertama, edukasi dan sosialisasi, di mana masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai status penyu sebagai satwa dilindungi, ancaman kepunahan, dan cara pelestarian. Kedua, kegiatan menjaga kebersihan pantai, yang bertujuan melindungi habitat penyu dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ketiga, patroli penyu, dilakukan oleh LPPL bersama masyarakat untuk mengawasi pantai dari perburuan telur dan aktivitas ilegal lainnya. Keempat, pendataan penyu, yaitu kegiatan mencatat jumlah penyu yang naik bertelur, lokasi sarang, serta jumlah tukik yang menetas, yang kemudian dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelima, perawatan penyu, yang mencakup pemeliharaan tukik di bak penangkaran, pemberian pakan, dan pemantauan kesehatan hingga siap dilepaskan kembali ke laut.

Transformasi sosial masyarakat Amping Parak terlihat jelas dari hasil

penelitian ini. Sebelum adanya program konservasi, mayoritas masyarakat mengambil telur penyu untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. Namun, sejak adanya program konservasi dan edukasi berkelanjutan, masyarakat beralih menjadi pelindung aktif. Mereka menyadari bahwa penyu adalah aset ekologi sekaligus daya tarik wisata yang mendatangkan manfaat jangka panjang. Partisipasi ini juga semakin mengakar karena masyarakat merasakan dampak langsung dari berkembangnya ekowisata konservasi penyu. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke Pantai Amping Parak untuk melihat penangkaran penyu, sehingga memunculkan peluang usaha baru seperti warung makanan, penjualan cenderamata, hingga homestay yang dikelola masyarakat setempat. Dengan demikian, konservasi penyu tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *Tangga Partisipasi* Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat Nagari Amping

Parak berada pada kategori *Partnership* atau kemitraan. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat yang bukan hanya sebatas tokenisme, tetapi memiliki posisi sejajar dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan konservasi. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, yang menunjukkan adanya distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang seimbang. Partisipasi ini bersifat kolektif, di mana masyarakat, pemerintah, dan LPPL bekerja sama membangun rasa memiliki terhadap program konservasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa partisipasi masyarakat Nagari Amping Parak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan konservasi penyu. Partisipasi tersebut bersifat multidimensional: pada aspek ekologis, berhasil meningkatkan populasi penyu dan melindungi habitatnya; pada aspek sosial, berhasil meningkatkan kesadaran dan solidaritas masyarakat; pada aspek ekonomi, membuka peluang usaha melalui ekowisata; dan pada aspek kelembagaan, memperkuat posisi

LPPL sebagai organisasi masyarakat yang berdaya. Oleh karena itu, konservasi penyu di Amping Parak dapat dijadikan model bagi daerah lain tentang bagaimana kolaborasi masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan sosial-ekonomi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Nagari Amping Parak dalam konservasi penyu telah berkembang dari pola eksploitatif menuju pola partisipatif yang lebih berkelanjutan. Transformasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan edukasi, regulasi, serta penguatan kelembagaan. Temuan ini selaras dengan pendapat Adil Siswanto (2024) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan strategi penting dalam pembangunan, karena memberikan ruang bagi individu maupun kelompok untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Amping Parak, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek program konservasi, melainkan telah berperan sebagai subjek yang

memiliki kontribusi nyata terhadap pelestarian penyu.

Jika dianalisis menggunakan teori *Tangga Partisipasi* Arnstein (1969), partisipasi masyarakat Amping Parak berada pada level *Partnership*. Tingkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dilibatkan secara simbolis (tokenism), tetapi benar-benar memiliki peran dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring program konservasi. Kehadiran *Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)* menjadi bukti nyata adanya redistribusi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Arnstein menekankan bahwa partisipasi yang ideal harus diiringi dengan transfer kekuasaan kepada warga, sehingga mereka dapat memengaruhi hasil program (Siti Nurjanah Ahmad, 2024). Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Amping Parak telah mendapatkan ruang dan kewenangan tersebut, misalnya dalam menentukan aturan patroli, pendataan, hingga pengelolaan ekowisata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Najmiah (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi penyu di Polewali Mandar

berada pada kategori tinggi dalam aspek perencanaan dan pengelolaan. Namun, berbeda dengan penelitian Ismail (2024) di Pantai Lowita, Pinrang, yang menemukan partisipasi pemuda masih rendah karena kurangnya motivasi dan keterbatasan sumber daya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan lokal, dukungan pemerintah, serta adanya insentif ekonomi. Di Amping Parak, faktor-faktor tersebut hadir melalui pengakuan hukum terhadap LPPL, dukungan regulasi nagari, dan berkembangnya ekowisata sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Zailani (2022) tentang pentingnya *community based tourism* dalam mendukung konservasi penyu. Di Amping Parak, berkembangnya ekowisata berbasis konservasi tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal, khususnya ibu rumah tangga yang berjualan di sekitar lokasi konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga memperkuat keberlanjutan program. Dengan kata lain, semakin besar manfaat sosial-ekonomi yang diperoleh masyarakat dari konservasi, semakin tinggi pula tingkat partisipasi dan komitmen mereka terhadap pelestarian penyu.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat Amping Parak dalam konservasi penyu merupakan contoh implementasi nyata dari teori partisipasi Arnstein yang berada pada level kemitraan. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara masyarakat, pemerintah nagari, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menghasilkan model konservasi berbasis masyarakat yang tidak hanya berfokus pada pelestarian ekologis, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, model ini dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan konservasi berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa partisipasi masyarakat Nagari Amping Parak berperan sangat penting dalam upaya konservasi

penyu. Sebuah transformasi perilaku yang signifikan telah terjadi, di mana masyarakat beralih dari praktik pengambilan telur menjadi penjaga dan pelindung aktif bagi penyu dan habitatnya. Keberhasilan ini juga terlihat dari masyarakat membentuk organisasi Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) yang tidak terlepas dari kolaborasi multipihak yang solid, serta berbagai elemen masyarakat umum. Hubungan antar para pihak ini menciptakan ekosistem konservasi yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), partisipasi masyarakat Nagari Amping Parak terhadap konservasi penyu berada pada tingkat Kemitraan (Partnership). Alasan berada pada tingkat kemitraan (Partnership) adalah karena terjadinya *stackholder*, yaitu keterlibatan semua pihak seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintahan Nagari dalam kegiatan konservasi penyu.

Ini terlihat dari masyarakat menjadi pelaksana langsung yang terus melaporkan dan bertanggung jawab atas perkembangan konservasi penyu. Dan di didukung oleh struktur kolaborasi yang kuat dari masyarakat

umum seperti nelayan, ibu-ibu PKK, dan Karang Taruna. Bentuk partisipasi yang dilakukan meliputi edukasi, menjaga kebersihan pantai, patroli, pendataan telur, partisipasi ekonomi melalui ekowisata, serta keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat lokal adalah kunci utama dalam mencapai tujuan konservasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan hal tersebut menemukan bahwa partisipasi masyarakat Nagari Amping Parak dalam konservasi penyu sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ario, A., Wibowo, A., Pratikto, R., & Fajar, S. (2016). Perlindungan Penyu di Indonesia: Status dan Tantangan. *Jurnal Biologi Tropis*, 16(1), 12–21.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Hamino, A., Parawangsa, W., Sari, N., & Arsad, M. (2021). Penyu dan Upaya Konservasi di Indonesia. *Jurnal Kelautan Tropis*, 24(2), 98–110.

- Hotimah, H. (2022). Teknik Observasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 6(1), 45–53.
- Ismail, I. (2024). Partisipasi Pemuda dalam Konservasi Penyu di Pantai Lowita, Pinrang. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 8(1), 33–42.
- Jussac, M. M. (2025). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Lingkungan. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 14(2), 77–88.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najmiah. (2023). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Penyu di Polewali Mandar. *Jurnal Konservasi Laut Nusantara*, 5(2), 54–66.
- Siboro, E. (2019). Keanekaragaman Hayati Indonesia: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Biologi Indonesia*, 15(1), 1–10.
- Siswanto, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(2), 102–113.
- Siti, N. A. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Konservasi. *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 9(1), 23–34.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawan, I., & Tehupeior, Y. (2023). Ancaman Perdagangan Telur Penyu terhadap Keberlanjutan Populasi. *Jurnal Konservasi Biota Laut*, 11(1), 41–50.
- Zailani, M. (2022). Community Based Tourism dalam Mendukung Konservasi Penyu. *Jurnal Ekowisata Bahari*, 7(2), 89–101.